

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih, berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77, 2020).

Dalam konteks struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD dibagi menjadi empat jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan.

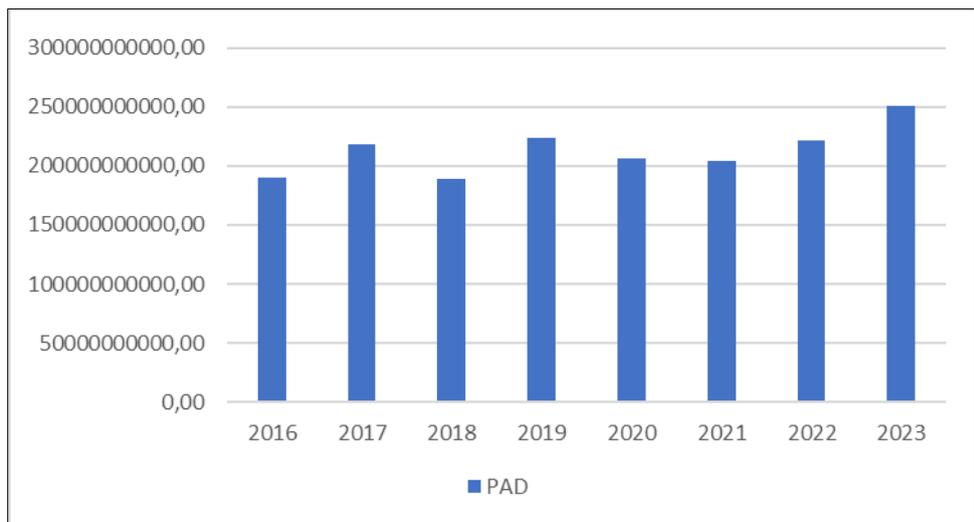
Kabupaten Banjar adalah salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun tidak secara konsisten. Tingkat penerimaan PAD suatu daerah mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2023

Tahun	PAD
2016	189.854.372.832
2017	217.734.255.687
2018	189.058.575.505
2019	223.039.381.642
2020	206.230.417.570
2021	203.841.949.657

Tahun	PAD
2022	221.010.477.564
2023	250.300.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Banjar



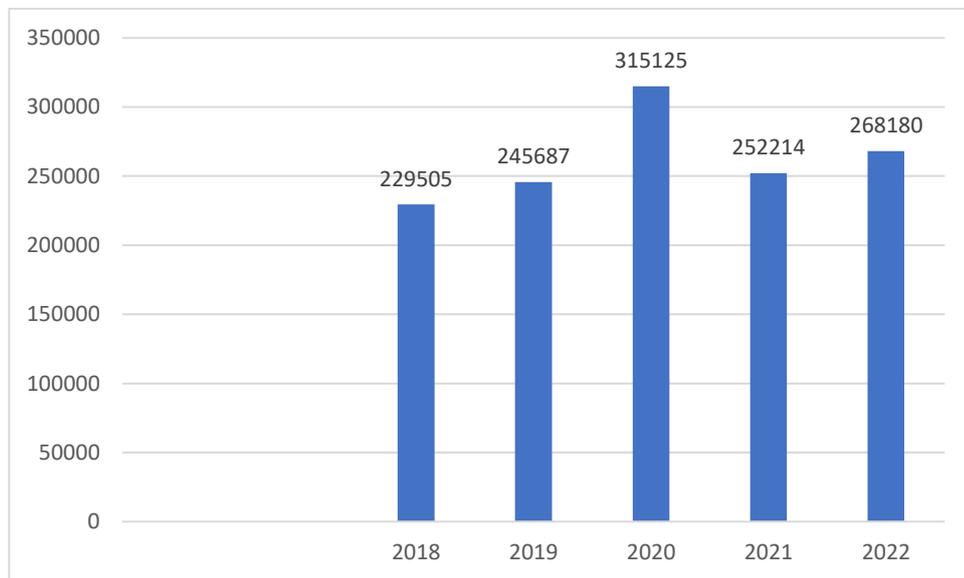
Sumber: BPKAD Kabupaten Banjar

Gambar I.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016-2023

Jika dilihat dari Tabel I.1 dan Gambar I.1 di atas, Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Banjar secara umum dapat disebut memuaskan, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun 2018 dan 2023. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar mencapai Rp. 189.854.372.832. Dari Tabel 1.1, terlihat bahwa akumulasi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018. Pada tahun 2019, PAD berhasil terkumpul sebesar Rp. 223.039.381.642, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 206.230.417.570. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19.

Potensi bagi pendapatan di Kabupaten Banjar cukup melimpah dan beragam, termasuk potensi yang berasal dari kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan jumlah kendaraan bermotor, di bawah ini akan disajikan grafik jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kabupaten Banjar.



Sumber: UPPD/SAMSAT Martapura

Gambar I.2 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banjar Tahun 2018-2022

Dari Gambar I.2 di atas, terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, jumlah kendaraan bermotor mencapai 315.125 unit lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan fasilitas parkir. Sebagai pemilik lahan di wilayahnya, pemerintah daerah bisa memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan penerimaan kas daerah. Dengan mendirikan fasilitas parkir di area yang memiliki potensi parkir yang baik, pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas layanan yang disediakan dalam pengembangan fasilitas parkir tersebut.

Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Mengingat kebutuhan fasilitas parkir semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di

wilayah Kabupaten Banjar. Penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Banjar yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Kabupaten Banjar
Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp86.550.000	Rp62.850.000
2021	Rp88.050.000	Rp44.800.000
2022	Rp88.050.000	Rp112.250.000
2023	Rp88.050.000	Rp120.900.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Dari Tabel I.2 di atas menunjukkan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini diduga sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Banjar sudah baik dari tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2021 realisasi retribusi parkir mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pengelolaan parkir berfungsi menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, pengelolaan parkir juga berfungsi meningkatkan kualitas kenyamanan kota (Desyanto, 2018). Penetapan target berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan keuangan daerah, jika target yang telah ditetapkan tidak terealisasi maka dapat berdampak pada berbagai aspek seperti kinerja keuangan pemerintah daerah (Sutrisno, 2020).

Jika dikaitkan dengan retribusi daerah Kabupaten Banjar, realisasi retribusi parkir masih sangat minim. Berikut ini adalah kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Kabupaten Banjar pada tahun 2020 sampai 2023.

Tabel I.3 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020–2023

Tahun	Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Parkir
2020	5.123.544.758	62.850.000
2021	5.921.675.670	44.800.000
2022	7.020.131.174	112.250.000
2023	8.385.320.000	120.900.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Banjar

Permintaan tempat parkir di Kabupaten Banjar meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Pertambahan jumlah kendaraan ini menjadi potensi bagi pendapatan Kabupaten Banjar, khususnya retribusi daerah. Parkir memiliki potensi yang cukup tinggi di Kabupaten Banjar karena memiliki 26 titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Jumlah tempat parkir tentu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena masih banyak lokasi yang berpotensi menjadi sumber dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tingginya potensi terhadap parkir berarti tinggi pula potensi bagi Kabupaten Banjar untuk mendapatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Maka dari itu, laporan ini akan membahas penelitian dengan judul "**Peningkatan Retribusi Parkir di Kabupaten Banjar**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pada wilayah studi, didapatkan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Di luar lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, terdapat sejumlah lokasi parkir yang berpotensi meningkatkan retribusi parkir. Namun saat ini lokasi parkir tersebut belum ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah melalui sistem retribusi parkir.
2. Fasilitas parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar saat ini belum memadai, khususnya dalam hal kapasitas. Hal ini

menyebabkan terbatasnya ruang parkir, yang pada akhirnya mendorong peningkatan praktik parkir sembarangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Dimana lokasi potensi peningkatan retribusi parkir di luar wilayah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, yang saat ini belum ditetapkan sebagai pendapatan daerah melalui sistem retribusi parkir?
2. Bagaimana desain parkir untuk lokasi parkir di luar wilayah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, guna meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui sistem retribusi parkir?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah mengusulkan lokasi parkir baru di luar wilayah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, dengan harapan dapat menjadi penyumbang retribusi parkir yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor parkir di Kabupaten Banjar. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan lokasi parkir baru di luar wilayah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banjar melalui retribusi parkir.
2. Melakukan desain parkir untuk lokasi di luar wilayah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

1.5 Ruang Lingkup

Penetapan ruang lingkup dilakukan untuk memastikan bahwa pembahasan dalam penelitian ini tetap sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penentuan ruang lingkup memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pemecahan yang dikaji dan memungkinkan melakukan

strategi pemecahan masalah secara sistematis. Berikut adalah ruang lingkup yang telah ditetapkan:

1. Wilayah penelitian rencana lokasi parkir baru yang menjadi potensi dalam peningkatan retribusi parkir mencakup 9 titik lokasi di luar pembinaan Dinas Perhubungan kabupaten Banjar, terdiri dari 7 lokasi parkir *Off Street* dan 2 lokasi parkir *On Street*.
2. Menganalisis potensi pendapatan retribusi parkir dalam waktu 1 tahun.
3. Melakukan desain parkir di titik lokasi parkir melalui aplikasi *AutoCad* dan *Sketchup*.
4. Melakukan survei parkir hanya pada waktu lokasi beroperasi.
5. Desain parkir tidak menghitung biaya perencanaan, pengadaan dan pemasangan sarana fasilitas pendukung parkir.
6. Mengkaji kinerja ruas jalan untuk usulan parkir *On Street* yaitu parkir Tepi Jalan Pasar Martapura di jalan Sukaramai dan parkir Tepi Jalan Syekh Arsyad Al-Banjari di jalan Kelampayan 1.